



SIARAN PERS

Nomor : 2/HMS/SP/JI-15/8/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto memiliki peran krusial dalam menjaga integritas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui pendekatan pencegahan dan penindakan. Pemetaan kerawanan dilakukan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang meliputi empat dimensi: Konteks Sosial-Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, dan Partisipasi.

Dimensi dan Sub-Dimensi IKP:

- Konteks Sosial-Politik:** Meliputi keamanan, otoritas penyelenggara, dan penyelenggara negara.
- Penyelenggaraan Pemilu:** Menilai hak memilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, ajudikasi, dan pengawasan.
- Kontestasi:** Mencakup hak dipilih, kampanye calon, dan isu kecurangan.
- Partisipasi:** Mengukur partisipasi pemilih dan kelompok masyarakat.

A. Temuan Pemetaan Kerawanan

Dari 61 indikator kerawanan, 12 indikator diidentifikasi berpotensi terjadi, termasuk ketidaknetralan penyelenggara negara dan pemilu, pelanggaran saat pemungutan suara, dan konflik antar pendukung. Analisis menunjukkan bahwa isu ketidaknetralan penyelenggara negara, terutama kepala desa, sangat rawan terjadi, berdasarkan kejadian sebelumnya.

Tabel Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Dimensi	Sub-Dimensi	Indikator
Konteks Sosial-Politik	Keamanan	Kekerasan berbau SARA, intimidasi peserta/penyelenggara
	Otoritas Penyelenggara	Putusan DKPP, rekomendasi Bawaslu
	Penyelenggara Negara	Ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI, penyalahgunaan anggaran
Penyelenggaraan Pemilu	Hak Memilih	Pemilih tidak terdaftar, pemilih ganda, pengelembungan data
	Kampanye	Ketidakprofesionalan penyelenggara, kampanye tidak sesuai
	Pemungutan Suara	Keterlambatan logistik, pelanggaran saat pemungutan
	Ajudikasi	Gugatan hasil pemilu, sengketa proses
	Pengawasan Pemilu	TPS tanpa pengawas
Kontestasi	Hak Dipilih	Penolakan calon, dokumen palsu
	Kampanye Calon	Kampanye di luar jadwal, materi kampanye hoax, politik uang
Partisipasi	Partisipasi Pemilih	Mobilisasi pemilih, penghalangan pemilih di TPS
	Partisipasi Masyarakat	Laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, penolakan pemilu



SIARAN PERS

B. Langkah Antisipasi (Mitigasi Dan Pencegahan)

Salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 adalah untuk, melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024, melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024 dan menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan.

Oleh karena hal tersebut dengan adanya 5 (lima) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto bersama Stakeholder melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi	
		Upaya Pencegahan	Strategi Pengawasan
1.	Ketidaknetralan Penyelenggara Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Imbauan kepada Kepala Desa se- Kabupaten Mojokerto. - Koordinasi dengan DPMD Inspektorat, serta Kepolisian - Sosialisasi secara spesifik terkait netralitas lewat media sosial, media massa, dan flyer 	Bawaslu Kab. Mojokerto beserta jajarannya melakukan pengawasan secara langsung/melekat pada setiap kegiatan kampanye tatap muka, pertemuan terbatas deklarasi terkait netralitas kepala desa
2.	Penyelenggara Pemilu yang menunjukkan Keberpihakan	<ul style="list-style-type: none"> - Imbauan netralitas - Koordinasi antar penyelenggara pemilu - Membuat sosialisasi pada jajaran tingkat Bawaslu. 	Melakukan pengawasan secara langsung terhadap penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU
3.	Ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Imbauan dan berkoordinasi dengan instansi BKD, Polres, Kodim - Membuat perjanjian kerjasama dengan BKD, Polres, dan Kodim terkait Netralitas ASN/TNI/ POLRI dan bersama-sama melakukan pengawasan 	Bawaslu Kab. Mojokerto beserta jajarannya melakukan pengawasan secara langsung dan membuat deklarasi terkait netralitas ASN/TNI/ POLRI
4.	Adanya Gugatan Hasil Pemilu dan Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Imbauan kepada KPU agar Profesional dalam melakukan rekapitulasi hasil sesuai dengan Peraturan yang berlaku 	Melakukan pengawas langsung dan melekat
5.	Adanya Penghitungan Suara Ulang di Pemilu/Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Imbauan kepada KPU agar Profesional dalam melakukan rekapitulasi hasil sesuai dengan Peraturan yang berlaku 	Melakukan pengawas langsung dan melekat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO



SIARAN PERS

Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan sejak awal proses Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun fokus upaya pencegahan yang telah dan akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Membuat imbauan pada setiap tahapan maupun sub-tahapan yang berjalan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berpotensi adanya pelanggaran pemilihan;
3. Membuat MoU maupun perjanjian kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, salah satunya berisi tentang melakukan pengawasan bersama;
4. Melakukan sosialisasi khususnya pada daerah yang dianggap paling rawan sesuai isu di atas.

Mojokerto, 25 Juli 2024

BAWASLU
KABUPATEN MOJOKERTO
KETUA,



DODY FAIZAL S.H

Bawaslu Mojokerto

